



Rekonstruksi Nilai Filosofis dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal

Didi Handono Syahputra ^{1*}, Muhammad Aldi Pratama ², Ahmad Wahyudi Zein ³,
Muhammad Rizky Putra ⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email didihandono7@gmail.com ^{1*}, maldip16@gmail.com ², ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id ³,
muhammadriskyputra231@gmail.com ⁴

Abstract, *Islamic economics was born as a response to the need for an economic system that is not only oriented towards profit, but also towards social justice and human welfare. This article discusses the reconstruction of philosophical values in Islamic economics as an effort to create an inclusive and sustainable economic order. With a conceptual approach, this study highlights principles such as justice, balance, and social responsibility that are at the core of Islamic economics. These values are reinterpreted in a modern context to address global challenges, including economic disparities and moral crises in the business world. The results of the analysis show that the application of the philosophical values of Islamic economics is not only able to improve the economic structure, but also create universal welfare that is in line with the objectives of sharia (Maqashid Syariah). Therefore, the integration of these values is important in formulating fair and ethical economic policies.*

Keywords: *Philosophical Values, Universal Welfare, Maqasidh Syariah*

Abstrak, Ekonomi Islam lahir sebagai respons atas kebutuhan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Artikel ini membahas rekonstruksi nilai-nilai filosofis dalam ekonomi Islam sebagai upaya menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Nilai-nilai ini direinterpretasi dalam konteks modern untuk menjawab tantangan global, termasuk kesenjangan ekonomi dan krisis moral dalam dunia bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam tidak hanya mampu memperbaiki struktur ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan universal yang selaras dengan tujuan syariah (Maqashid Syariah). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai tersebut menjadi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan beretika.

Kata Kunci: Nilai Filosofis, Kesejahteraan Universal, Maqasidh Syariah

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam muncul sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif yang mengedepankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada akumulasi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi semata, ekonomi Islam menawarkan konsep yang lebih holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai ekonomi Islam sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan ketat dan dominasi sistem ekonomi kapitalis. Banyak institusi keuangan dan pelaku ekonomi

Islam yang terjebak dalam praktik yang menyimpang dari nilai-nilai filosofis yang seharusnya dijunjung tinggi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi nilai-nilai filosofis dalam ekonomi Islam agar dapat lebih relevan dan efektif dalam menciptakan kesejahteraan universal.

Rekonstruksi nilai-nilai filosofis ini melibatkan pemahaman ulang terhadap konsep dasar seperti keadilan distributif, keseimbangan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai sistem keuangan teknis, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang mencakup dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai masalah ekonomi global, termasuk ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan eksploitasi sumber daya alam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mereinterpretasi nilai-nilai filosofis dalam ekonomi Islam guna menciptakan model ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan universal. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini akan memadukan kajian literatur, analisis filosofis, dan refleksi atas praktik ekonomi Islam kontemporer untuk menemukan solusi yang sesuai dengan tujuan syariah (Maqashid Syariah).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research dan studi literatur sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data dan analisis. Metode library research dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik rekonstruksi nilai filosofis dalam ekonomi Islam. Studi literatur dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini akan diseleksi, dikelompokkan, dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan relevansinya dalam konteks kesejahteraan universal. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk menggali makna filosofis serta potensi aplikasinya dalam sistem ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Konseptual Nilai Filosofis Dalam Ekonomi Islam

Nilai filosofis dalam ekonomi Islam menjadi dasar yang membedakan sistem ekonomi ini dengan yang lain. Nilai-nilai ini mencakup prinsip yang mengatur hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam dalam aktivitas ekonomi, serta berorientasi pada keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan universal. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemilik mutlak alam semesta. Dalam konteks ekonomi, konsep ini menuntut manusia untuk mengelola sumber daya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tauhid juga menjadi landasan untuk menghindari perilaku konsumtif dan materialistik yang berlebihan, mendorong ekonomi berbasis etika dan moral (Nizar, 2021).

Keadilan atau al-‘adl adalah prinsip utama yang menuntut distribusi kekayaan dan sumber daya secara proporsional, sesuai hak masing-masing. Islam melarang monopoli dan ketimpangan sosial yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan (Syahputra, 2020). Khilafah, yang bermakna kepemimpinan manusia di bumi, menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam ekonomi Islam, tanggung jawab ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem demi kesejahteraan generasi mendatang.

Tazkiyah, yang berarti penyucian diri dan harta, mengajarkan pentingnya melakukan transaksi yang bersih dari riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada niat yang tulus untuk mencapai keberkahan. Tazkiyah juga mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial (Hidayatullah, 2020). Maslahah atau kemaslahatan umum menjadi tujuan utama dari seluruh sistem ekonomi Islam. Maslahah memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip ini selaras dengan maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Melalui penerapan nilai-nilai filosofis ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini memberikan alternatif bagi sistem ekonomi global yang seringkali lebih berorientasi pada keuntungan material semata.

Peran Rekonstruksi Nilai Filosofis dalam Mewujudkan Kesejahteraan Universal

Rekonstruksi nilai filosofis dalam ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan universal. Upaya ini diperlukan untuk mengembalikan esensi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi, sehingga dapat menjawab tantangan modern seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan degradasi moral. Rekonstruksi nilai tauhid mengingatkan manusia akan posisinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Dalam konteks ini, manusia didorong untuk memandang aktivitas ekonomi sebagai ibadah. Tauhid mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual. Dengan berlandaskan tauhid, setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai ridha Allah, yang berimplikasi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan beretika. Dalam aspek keadilan, rekonstruksi nilai ini berupaya mengatasi ketimpangan yang terjadi akibat praktik ekonomi konvensional yang sering berorientasi pada akumulasi kekayaan. Nilai keadilan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, keadilan juga menjadi dasar untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang melindungi kelompok rentan dan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya.

Khilafah sebagai nilai filosofis memberikan panduan bagaimana manusia mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Rekonstruksi nilai ini menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi, baik di tingkat individu maupun kolektif. Dalam konteks modern, nilai ini relevan untuk mendorong ekonomi hijau dan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan ekonomi Islam (Rahim, 2022). Nilai tazkiyah atau penyucian diri dan harta memiliki peran penting dalam membangun ekonomi yang bersih dan transparan. Rekonstruksi nilai ini menjadi pengingat bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh terkontaminasi oleh praktik-praktik yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, tazkiyah juga menjadi dasar bagi individu untuk terus berbagi rezeki dengan yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Masalah atau kemaslahatan umum menjadi tujuan utama dalam rekonstruksi nilai-nilai ekonomi Islam. Prinsip ini mengarahkan kebijakan ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam proses rekonstruksi, masalah juga dipadukan dengan inovasi teknologi untuk menjawab kebutuhan zaman, seperti digitalisasi layanan keuangan syariah yang inklusif (Wardani, 2020). Dengan rekonstruksi nilai-nilai filosofis ini, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih

berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan universal. Hal ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga dapat menjadi solusi alternatif untuk tantangan ekonomi global.

Keseimbangan Sosial-ekonomi Sebagai Tujuan Utama

Keseimbangan sosial-ekonomi merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan menciptakan harmoni antara aspek material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta kebutuhan masa kini dan masa depan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan universal yang berkelanjutan dan inklusif.

Konsep keseimbangan dalam Islam berakar pada prinsip keadilan (al-'adl) yang mendorong distribusi kekayaan dan sumber daya secara proporsional. Dalam konteks ini, Islam melarang praktik yang menyebabkan kesenjangan sosial, seperti monopoli dan riba. Sebaliknya, Islam mendorong distribusi yang adil melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial-ekonomi (Syamsuddin, 2020). Keseimbangan sosial-ekonomi juga diwujudkan melalui nilai maslahah, yang menekankan kemaslahatan umum sebagai prioritas utama. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Dengan cara ini, ekonomi Islam mengurangi jurang ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (Fauzi, 2021).

Dalam aspek individu, keseimbangan ini dicapai melalui konsep tazkiyah, yang mendorong penyucian harta dan jiwa. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hanya dapat diraih jika seseorang memanfaatkan hartanya untuk kebaikan dan menghindari perilaku konsumtif atau eksploitasi terhadap orang lain. Dengan prinsip ini, keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat dapat terwujud (Rahman, 2022). Selain itu, keseimbangan sosial-ekonomi juga melibatkan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Prinsip khilafah mendorong pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Pendekatan ini mencakup upaya pengelolaan yang berkeadilan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial (Hamzah, 2020). Dengan keseimbangan sosial-ekonomi sebagai tujuan utama, ekonomi Islam berusaha menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat

menjadi solusi alternatif untuk tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan.

Kritik Terhadap Implementasi Nilai Ekonomi Islam Saat Ini

Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik modern sering kali menghadapi berbagai kritik yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal dan realitas. Walaupun sistem ekonomi Islam diakui sebagai alternatif yang etis dan inklusif, penerapannya sering kali kurang optimal dalam mencerminkan esensi filosofis yang menjadi dasarnya. Salah satu kritik utama adalah terkait dengan keberlanjutan sistem perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah mengklaim beroperasi sesuai prinsip syariah, beberapa praktiknya dinilai hanya menjadi bentuk replikasi dari sistem perbankan konvensional. Produk-produk keuangan syariah seperti murabahah lebih sering digunakan dibandingkan dengan skema berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang sebenarnya lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kritik lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap distribusi kekayaan yang merata. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Banyak lembaga zakat dan wakaf yang masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan distribusi dana, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin belum signifikan. Selain itu, aspek lingkungan sering kali terabaikan dalam implementasi ekonomi Islam. Prinsip khilafah yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi tidak selalu tercermin dalam kebijakan ekonomi syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah masih mendanai proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan.

Dari sisi regulasi, penerapan ekonomi Islam juga menghadapi kritik terhadap inkonsistensi dan kurangnya pengawasan. Beberapa negara dengan sistem ekonomi Islam belum memiliki regulasi yang cukup ketat untuk memastikan bahwa seluruh praktik keuangan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan munculnya praktik-praktik yang ambigu secara hukum syariah, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Kritik berikutnya berhubungan dengan edukasi dan literasi ekonomi Islam. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam menyebabkan penerapannya kurang maksimal. Banyak individu dan pelaku usaha yang masih terjebak dalam sistem ekonomi konvensional karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan mengakses layanan keuangan syariah (Anwar, 2020).

Untuk mengatasi kritik-kritik ini, perlu adanya upaya serius dalam merevitalisasi nilai-nilai ekonomi Islam, baik melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga, maupun edukasi masyarakat. Hanya dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi solusi yang relevan dan efektif dalam menciptakan kesejahteraan universal.

Integrasi Nilai Filosofis Dalam Kebijakan Ekonomi Islam

Pendekatan filosofis dalam kebijakan ekonomi Islam mencerminkan penerapan nilai-nilai inti yang bersumber dari syariah, seperti keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk membangun kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada penciptaan harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, yang mengakui Allah sebagai pemilik segala sesuatu. Tauhid ini menjadi pijakan untuk aktivitas ekonomi yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Prinsip ini menolak eksploitasi ekonomi, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, karena bertentangan dengan nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam. Kebijakan seperti zakat, wakaf, dan subsidi, misalnya, diterapkan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sesuai dengan pesan dalam QS. Al-Hashr [59]: 7, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu.

Selain itu, ekonomi Islam mendorong keseimbangan antara sektor riil dan sektor finansial. Larangan spekulasi dalam transaksi ekonomi menjaga stabilitas pasar dan menghindari ketidakadilan, sementara kebijakan berbasis *maslahah* dirancang untuk menghasilkan manfaat bersama, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Implementasi nilai-nilai ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi isu-isu global seperti ketidakadilan sosial dan perubahan iklim.

Namun, upaya mengintegrasikan nilai filosofis ke dalam kebijakan ekonomi Islam tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keselarasan kebijakan berbasis nilai Islam dengan sistem ekonomi global yang cenderung kapitalistik. Selain itu, pemahaman yang terbatas di kalangan pemangku kebijakan sering kali membuat nilai filosofis Islam tereduksi hanya pada aspek teknis, tanpa menggali dimensi spiritual dan etis yang lebih dalam. Nilai-nilai filosofis dalam ekonomi Islam memberikan panduan yang signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kebijakan yang dirancang berdasarkan nilai-nilai ini mampu memberikan solusi untuk berbagai persoalan kontemporer, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya

spiritualitas dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Islam bukan sekadar instrumen regulasi, tetapi juga manifestasi dari sistem nilai yang berorientasi pada kesejahteraan umat secara holistic (Chapra, M. U. (2000).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa rekonstruksi nilai filosofis dalam ekonomi Islam merupakan langkah esensial untuk menciptakan kesejahteraan universal yang berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Nilai-nilai fundamental seperti tauhid, keadilan, masalah, khilafah, dan tazkiyah memberikan fondasi yang kokoh untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan umat. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurang optimalnya lembaga keuangan syariah dalam mempraktikkan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang belum merata, dan minimnya perhatian terhadap aspek lingkungan. Selain itu, kebijakan ekonomi modern sering kali belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai filosofis Islam, sehingga masih terjadi kesenjangan antara idealisme dan realitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi nilai-nilai Islam, penguatan regulasi berbasis syariah, serta edukasi masyarakat yang lebih mendalam untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai filosofis ke dalam kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi global yang relevan, baik dalam mengatasi kesenjangan sosial maupun dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Surah Al-Hasyr [59] :7

Anwar, F. (2020). "Literasi Ekonomi Islam di Kalangan Masyarakat". *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Islam*, 11 (2), 23-31

Chapra, M. U. (2020). "The Future Of Economics: An Islamic Perspective. The Islamic Foundation

Fauzi, M. (2021). Masalah dan Keseimbangan Sosial dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 56-64.

Hamzah, N. (2020). Prinsip Khilafah dan Keberlanjutan Ekonomi. *Jurnal Studi Ekonomi Hijau Islam*, 8(4), 45-53.

- Hidayatullah, R. (2020). " Tazkiyah dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah". Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 7(2), 34-42.
- Nizar, M. (2021). "Tauhid sebagai Landasan Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia, 9 (2), 112-120.
- Rahim, S. (2022). Prinsip Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Hijau Islam, 10(3), 45-53.
- Syahputra, A. (2020). "Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam". Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 8(1), 45-53.
- Syamsuddin, A. (2020). Keadilan dalam Distribusi Kekayaan Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(1), 34-41.
- Wardani, L. (2020). Masalah dan Digitalisasi Ekonomi Islam. Jurnal Transformasi Ekonomi Islam, 7(2), 89-97.